

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kabupaten Kebumen

Perencanaan Anggaran Kebumen Disoal

<https://www.koranbernas.id/berita/detail/perencanaan-anggaran-kebumen-disoal>

KORANBERNAS.ID —Tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2018 menunjukkan, kurang baiknya perencanaan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dikhawatirkan bisa mengurangi pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun anggaran mendatang.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Bagus Setyawan kepada wartawan

Kamis (11/7/2019) mengatakan, besarnya SILPA tahun anggaran 2018 berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2018 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp 201,692 miliar lebih. Sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2018 menurut eksekutif sebanyak Rp 163 miliar, akan digunakan untuk menutup rencana defisit anggaran tahun anggaran 2020.

Adanya SILPA diantaranya ada selisih lebih antara pagu anggaran (perencanaan) dengan kontrak kerja pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan fisik, tidak berarti ada penghematan penggunaan anggaran. Kondisi semacam itu lebih disebabkan kurang optimalnya perencanaan di sejumlah OPD.

"Tidak bisa dikatakan ada penghematan, tapi kurang optimalnya perencanaan," kata Bagus Setyawan.

Tingginya SILPA bisa menimbulkan penilaian dari pemerintah pusat, Kabupaten Kebumen kelebihan anggaran. Hal ini bisa berakibat kucuran DAK yang diperoleh Kebumen pada tahun anggaran mendatang sangat mungkin dikurangi.

"Catatan BPK setelah audit diantaranya perencanaan perlu diperbaiki," kata Bagus Setyawan.

Catatan koranbernas.id, dalam Perda APBD Tahun anggaran 2018, ada defisit anggaran lebih dari Rp 163,93 miliar. Namun realisasi pendapatan dan belanja ternyata mengalami surplus atau SILPA sebesar Rp 201,692 miliar lebih.

Sementara itu rapat paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, dengan agenda persetujuan Raperda Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2018, Kamis (11/7/2018), gagal mengambil keputusan persetujuan raperda itu menjadi perda.

Hal itu disebabkan kehadiran anggota DPRD Kebumen tidak memenuhi kuorum. Wakil Bupati Kebumen Arif Sugianto hadir pada rapat paripurna mewakili Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz.

Ketika rapat paripurna dibuka Wakil Ketua DPRD Kebumen Bagus Setyawan jam 13.00 atau mundur 4 jam dari jadwal, jumlah anggota DPRD Kebumen yang hadir hanya 28 orang. Sedangkan kuorum 34 orang. Setelah sekali penundaan anggota yang hadir tidak bertambah. Sehingga pimpinan DPRD Kebumen berdasarkan tata tertib DPRD Kebumen memutuskan sidang ditunda Selasa (16/7/2019). (yve)